

ABSTRAK

Indonesia diberikan anugerah oleh Allah SWT, berupa sumber daya alam yang sangat melimpah berupa air, daratan dan udara serta didalamnya satwa yang saat ini dilindungi oleh Undang-undang karena terancam punah, yang dikarenakan oleh maraknya perburuan dan perdagangan satwa tersebut. Polisi Kehutanan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan, senantiasa berperan aktif dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Polisi Kehutanan membagi tugasnya dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu, yang bersifat *Preemptif* (upaya pencegahan niat pelaku), *Preventif* (Upaya pencegahan tindakan pelaku), *Partisipatif* (pengamanan dengan melibatkan masyarakat) dan *Represif* (Upaya penegakan hukum melalui kegiatan operasi pengamanan). Namun dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan menjumpai beberapa kendala diantaranya, jumlah personil yang kurang mencukupi, cakupan wilayah kerja yang begitu luas (18 orang Polisi Kehutanan dengan cakupan wilayah kerja 3 Propinsi) dan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan adakah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari studi lapangan, data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-undangan dan data tersier dari kamus dan katalog perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut; (1) Apakah peran Polisi kehutanan dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Undang-undang, kemudian (2) Apakah kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Undang-undang.

Kata kunci, Peran Polisi Kehutanan, tindak pidana, perdagangan satwa yang dilindungi Undang-undang.

ABSTRACT

Indonesia is granted by Allah SWT, in the form of abundant natural resources in the form of water, land and air and in it animals that are currently protected by the law because of endangered, which is due to the rampant hunting and trading of these animals. Forestry Police as the spearhead in forest and forest product security activities, always play an active role in the effort to handle the crime of trafficking of protected animals. In carrying out their duties, the Forestry Police divide their duties into 4 (four) major groups namely, the Preemptif (the prevention of the perpetrators), the Preventative (the prevention action of the perpetrators), the Participatory (the security with the involvement of the community) and Repressive (Law enforcement efforts through security operations). However, in the implementation of the tasks of the Forest Police, there are several obstacles, such as insufficient number of personnel, wide scope of work area (18 Forest Police officers with 3 provinces working area) and lack of facilities and infrastructure.

Research conducted by using a sociological juridical approach. The sources and types of data available in this study are primary data obtained from field studies, secondary data from legal documents and regulations and tertiary data from dictionaries and library catalogs.

Based on the results of research that has been done, then concluded the things as follows; (1) Does the role of the forestry Police in the effort to handle the illegal trafficking of protected animals Law, then (2) What are the constraints or obstacles faced by the Forest Police officers in handling the criminal trafficking of protected animals.

Keywords, Roles of Forest Police, criminal offenses, trade in protected animals.